

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Dalam Meraih Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

RIMA NAZRIYATI ATHAR
NIM. 10973006714

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAKSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

Oleh : Rima Nazriyati Athar

Sistem akuntansi keuangan daerah dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Seiring berkembangnya sistem akuntansi keuangan daerah yakni dengan sistem double entry dan basis akrual, yang dianggap dapat mewujudkan akuntabilitas publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun beberapa masalah yang ditemui dalam penelitian ini antara lain : dalam hal pencatatan, penyusutan aset tetap, dan penyesuaian.

Atas masalah yang ditemui tersebut, penulis berupaya memperoleh data-data yang terkait terdiri dari : buku kas umum, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya data-data telah diperoleh tersebut di analisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu membandingkan keadaan yang sebenarnya terjadi dengan teori-teori yang relevan, guna untuk memperoleh hasil penelitian atas masalah yang ditemui terkait dengan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis atas masalah yang ditemui dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sehingga dari hasil penelitian tersebut, penulis mencoba memberikan masukan, solusi serta saran-saran bagi instansi tersebut dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pelaksanaan keuangan daerah untuk di masa yang akan datang lebih baik, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Sistem pencatatan, Penyusutan Aktiva Tetap, Penyesuaian.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem Akuntansi	13
2.2. Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.3. Perbedaan antara Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan	19
2.4. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	21

2.5. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Akuntansi	23
2.6. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah	24
2.7. Penatausahaan Keuangan Daerah	24
2.8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006	26
2.9. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah	35
2.10. Elemen-elemen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	38
2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	50
2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	51

BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Domisili dan Bentuk Hukum Serta Justifikasi Tempat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	52
3.2. Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau.....	52
3.3. Aktivitas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.....	53
3.4. Struktur Organisasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	5

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	59
4.2. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	65
4.3. Analisis Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah.....	69
4.4. Analisis Pelaporan Keuangan Pemerintah	79

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	83
5.2. Keterbatasan dan Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

II.1 Buku Jurnal Penerimaan Kas.....	28
II.2 Buku Jurnal Pengeluaran Kas.....	31
II.3 Buku Jurnal Umum	39
II.4 Buku Besar	39
II.5 Daftar Saldo.....	39
IV.1 Buku Kas Umum	61
IV.2 Buku Kas Umum	62
IV.3 Buku Kas Umum	66
IV.4 Jurnal Umum.....	67
IV.5 Buku Jurnal Penerimaan Kas	68
IV.6 Buku Jurnal Pengeluaran Kas	68
IV.7 Jurnal Penyesuaian.....	77
IV.8 Jurnal Penyesuaian.....	77
IV.9 Jurnal Penyesuaian.....	78
IV.10 Jurnal Penutup.....	78
IV.11 Neraca	8

DAFTAR GAMBAR

Bagan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	55
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 2	Neraca
Lampiran 3	Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran 4	Buku Kas Umum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi Pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pemahaman Pemerintah, meskipun kelihatannya sebagai lembaga politik, namun aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, Undang-undang Nomor 108 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemda juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena

itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

Peraturan perundangan tentang keuangan negara pertama kali dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang bernama *Indische Compatabiliteitswet* (ICW) masih terdapat kelemahan yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal. Dengan demikian, Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan kinerja. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Kementrian Negara/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain peraturan tersebut pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, sistem keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi : (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan (4) Prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pemerintahan daerah tersebut disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, contoh inputnya adalah bukti memorial dan surat perintah membayar. Prosesnya meliputi tahap-tahap yaitu : (1) Transaksi, (2) Jurnal, (3) Posting ke buku besar, (4) Membuat daftar saldo, (5) Membuat jurnal penyesuaian, (6) Neraca saldo setelah penyesuaian, (7) Membuat laporan keuangan. Tahap yang terakhir adalah membuat jurnal penutup, menutup rekening pendapatan dan biaya. Komponen laporan keuangan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada paragraph 28, dijelaskan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai suatu entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kepala daerah Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan seharusnya dapat memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN. Selanjutnya penyusunannya juga harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pencatatan yang dibuat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yakni tidak melakukan pemisahan antara jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, dimana semua transaksi atau kejadian keuangan dibukukan pada buku kas umum yang disediakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan mengenai pemisahan jurnal yaitu, 1) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas, 2) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas, dan 3) Transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal umum. Akibatnya, sulit mengidentifikasi transaksi mana yang merupakan penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, masih memiliki beberapa masalah dalam hal pencatatannya yang masih menggunakan prinsip basis kas yaitu yang terdiri hanya dari informasi kas masuk, kas keluar,

dan saldo kas saja. Serta penggunaan sistem pencatatan yang masih menggunakan sistem pencatatan *single entry*.

Kurang optimalnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terutama dalam proses pencatatannya yaitu yang seharusnya pada saat ini sudah sepenuhnya menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) dan prinsip Basis Akrua (*accrual basis*) tetapi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura belum sepenuhnya menerapkannya, mereka masih menggunakan sistem pembukuan tunggal berbasis kas (*single entry*).

Tidak membuat jurnal penyesuaian atas persediaan berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional senilai Rp. 341.500,00. Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tidak membuat jurnal penyesuaian pada pendapatan dan belanja/biaya agar menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Begitu juga pada aktiva dan kewajiban, guna menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian salah satunya ialah penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau juga tidak melakukan penyusutan terhadap aset-aset tetap.

Jumlah aset tetap pada Neraca tahun 2011 senilai Rp. 876.748.664.599,18 yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

DAFTAR ASET TETAP

No.	Nama Aset Tetap	Nilai
1.	Tanah	Rp. 782.742.656.500,00
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 29.217.776.256,16
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 56.164.017.932,50
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 7.991.139.251,52
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 564.920.650,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 68.154.000,00
	Total Aset Tetap	Rp. 876.748.664.599,18

Akibatnya, aset yang disajikan dalam laporan keuangan yaitu neraca tidak berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya, dan tidak dapat diandalkan keakuratannya.

Tien (2004) meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan, menyimpulkan bahwa pemda masih belum melaksanakan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan sistem yang baru yaitu dengan *double entry* dan basis akrual.

Syukrizal (2008) meneliti tentang Analisis Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, hasil menunjukkan bahwa belum diterapkannya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hal yang sama juga dilakukan kembali oleh Siska (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Siska (2009) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemda Kabupaten Kampar menyimpulkan bahwa

pemda belum melaksanakan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Winda (2011) meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Kota Padang, menyimpulkan bahwa penerapan sistem pencatatan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun belum mengikuti standar yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dari beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada tiap SKPD di seluruh provinsi Indonesia. Hal tersebut memotivasi saya untuk melakukan penelitian kembali, karena masih banyak terdapat SKPD yang belum optimal melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan format yang ditetapkan.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan diatas yang mengacu pada permasalahan yang muncul, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :“ **Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau** “.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

“ Apakah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ? ”.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian saya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pekanbaru, hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan akuntansi keuangan daerah.
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi apabila ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.

3. Bagi penulis, sangat menambah wawasan penulis pada bidang akuntansi secara umum dan di bidang akuntansi keuangan daerah secara khusus.

1.4. Metode Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Jl. Hr. Soebrantas No. 4 Pekanbaru.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tahun 2011 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan sekunder adalah mengambil data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, dan struktur organisasi. Disamping itu untuk menggali berbagai informasi tentang proses pengelolaan keuangan, dilakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pembukuan.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu menguraikan secara rinci data yang diperoleh kemudian dibandingkan

dengan teori dan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil evaluasi dan analisis akan menyajikan komponen dan catatan apa saja dalam laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam 5 bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan berikut ini :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang teori-teori yang terkait dengan pembahasan skripsi ini antara lain pengertian sistem akuntansi, fungsi dan tujuan penyusunan sistem akuntansi, akuntansi keuangan daerah, perbedaan antara akuntansi keuangan daerah dan akuntansi perusahaan, kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi, lingkungan akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah, sistem akuntansi daerah menurut peraturan

pemerintah daerah menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, sistem pencatatan dan dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006.

BAB III. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Bab ini menguraikan tentang profil Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau, program kerja, dan struktur organisasi.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini membahas tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, dan dasar pengakuan akuntansi keuangan daerah.

BAB V. Penutup.

Bab ini menyimpulkan dari hasil penelitian dan pengajuan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem Akuntansi

Setiap organisasi memerlukan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajerial dan pengambilan keputusan ekonomi, untuk itu diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Menurut (Mulyadi, 2001) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem diciptakan untuk menangani suatu hal yang rutin terjadi.

Sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (James A Hall, 2001).

Akuntansi adalah suatu sistem dimana sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri atas sub-sub sistem kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input*(masukan) menjadi *output* (keluaran). *Input* sistem akuntansi adalah bukti- bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, *output*nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan (Indra Bastian, 2002:2).

Menurut (Mulyadi, 2001:3) pengertian sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan-catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan suatu perusahaan. Sedangkan menurut (Narko, 2002:4) sistem akuntansi yaitu sebagai jaringan yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur alat-alat dan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dapat kita kumpulkan pengertian umum dari sistem akuntansi yaitu meliputi keseluruhan jaringan komunikasi digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan. Dan dari definisi tersebut, unsur sistem akuntansi adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu serta laporan keuangan.

1.2. Akuntansi Keuangan Daerah

1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah atau akuntansi pemerintahan merupakan salah satu jenis akuntansi, maka didalam akuntansi pemerintahan juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintahan.

Definisi akuntansi keuangan daerah menurut (Ihyaul Ulum, 2004:910) adalah suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten atau kota) yang dijadikan informasi dalam

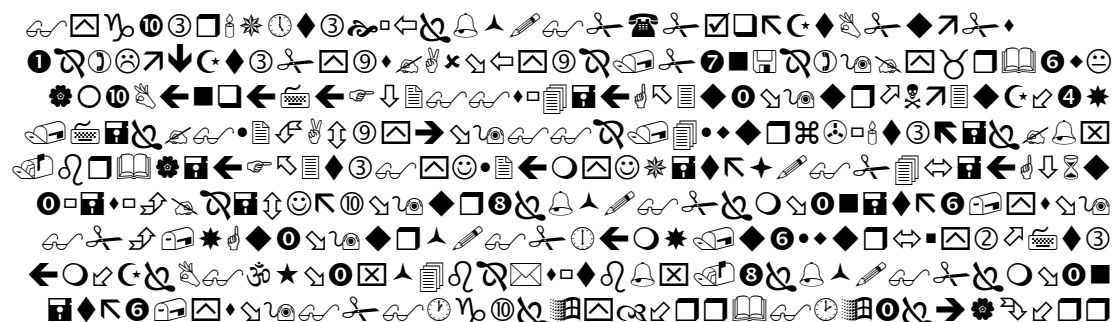
rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan, dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu.

2. Pengertian Akuntansi Menurut Syariah

Suatu pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi lain yang menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik dari catatan tersebut sesuai dengan syari'at islam. Laporan-laporan itu yang sifatnya umum/khusus memberikan informasi yang berguna kepada para manajer, pemilik, kreditur/debitur, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Para ahli berkata tentang tafsir dari firman Allah, *faktubuhu* yang berarti “tuliskanlah” bahwa perintah untuk menuliskan uang dan harta adalah suatu keharusan untuk menjaga harta itu dan menghilangkan kewaswasan atau keraguan. Orang yang mencatatnya harus jujur dan amanah dalam agamanya serta terhadap kebutuhan orang yang mempunyai hak. Yang terpenting semua pencatatan tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'ah (berdasarkan Al-quran dan Hadist) serta prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Prinsip operasional Akuntansi Syari'ah seperti yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah : 282, sebagai berikut :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

3. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peaturan perundangan yang berlaku (Abdul Halim, 2004:18). Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai sistem yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pemerintah daerah yang menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu dengan mutu dapat diandalkan (Indra Bastian, 2001:151).

4. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dari alokasi daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan pengguna jasa publik (Mardiasmo, 2002: 14).

Menurut (Standar Akuntansi Keuangan No. 1, 2004:4) Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.3. Perbedaan antara Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan antara lain :

1. Akuntansi keuangan daerah direncanakan, diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar dana, tetapi terpisah dalam kesatuan macam-macam dana. Sedangkan akuntansi perusahaan merupakan kesatuan yang utuh.
2. Akuntansi keuangan daerah lebih mengutamakan kepentingan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan akuntansi perusahaan lebih mengutamakan prinsip yang diterima umum.
3. Adanya perbedaan mendasar terhadap tujuan anggaran pemerintah dengan perusahaan, pemerintah tidak berorientasi keuntungan semata tetapi lebih banyak memenuhi kebutuhan atau kepentingan umum. Sedangkan perusahaan bertujuan untuk orientasi keuntungan.
4. Hubungan antara rakyat yang saling memberi dana dan rakyat sebagai penerima jasa-jasa pelayanan adalah tidak langsung dan juga pada umumnya tidak terdapat pasar terbuka yang dapat menguji manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah (Muhammad Gede, 1999 : 26).

Sedangkan perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan dalam pemaparan yang berbeda yakni sebagai berikut :

Akuntansi Pemerintahan :

- a. Tidak terdapat laporan laba rugi sebagai bagian laporan keuangan, tetapi tetap ada laporan hasil operasi.

- b. Terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnal untuk anggaran yang telah disetujui.
- c. Menggunakan akuntansi dana dan berbagai jenis dana dapat digunakan.
- d. Pengeluaran modal dilaporkan baik dalam laporan neraca, maupun dalam laporan operasional.
- e. Sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintahan.
- f. Perkiraan “modal” diganti “saldo dana”.

Akuntansi perusahaan :

- a. Menghasilkan laporan laba rugi sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan.
- b. Tidak ada perkiraan anggaran (*non budgetary accounting*) sehingga tidak ada jurnal untuk anggaran.
- c. Semua aset, kewajiban dan ekuitas merupakan dari satu dana.
- d. Pengeluaran modal hanya dilaporkan dalam neraca.
- e. Tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan pemerintah.
- f. Ada perkiraan modal. (Bahtiar Arif, 2002 : 8).

2.4. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah

a. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah sebagai organisasi yang memegang peran utama dalam pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip atau standar akuntansi dan pelaporan harus dipahami

dalam hubungannya dengan lingkungan tempat prinsip itu dipergunakan, selain juga dari sisi pemakaian laporan keuangan.

b. Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Adapun karakteristik akuntansi pemerintah tersebut adalah :

1. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Di dalam akuntansi pemerintahan di mungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan operasional.
5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca (Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar, 2002 : 7).

Sasaran pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Adapun pemerintah memiliki tujuan secara umum untuk mensejahterakan rakyat. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas dari pada sekedar ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan suatu laporan keuangan.

2. Manajerial

Selain tujuan akuntabilitas, akuntansi pemerintah menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, dan ekonomis.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI (Bahtiar Arif, Muclis, Iskandar, 2002:5).

2.5. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu :

1. Akuntansi Komersial/Perusahaan

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

2. Akuntansi Pemerintahan

Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

3. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah Neraca Pembayaran Negara, Rekening Arus Dana, Rekening Pendapatan dan Produksi Nasional, serta Neraca Nasional.

Lingkungan akuntansi pemerintah adalah :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. Akuntansi Pemerintah Propinsi
 - b. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota (Abdul Halim, 2004 : 30).

2.6. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Lingkungan atau pemakai laporan keuangan pemerintah daerah adalah DPRD, Badan Eksekutif, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Investor, Kreditur, Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, Pemerintah Pusat.

2.7. Penatausahaan Keuangan Daerah

Perubahan yang terjadi pada otonomi daerah dengan keluarnya UU Nomor 22/25 Tahun 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta peraturan pendukungnya akan bermuara pada pelaksanaan *Good Government*. Agar Good Government menjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian di dalam sistem penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa hal pokok yang harus diperhatikan dalam penerapannya dilapangan, hal-hal pokok tersebut adalah:

a. Azaz Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

- 1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan /pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah untuk pelaksanaan APBD kepala Daerah menetapkan :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD.
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM.
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPJ.
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D.
- e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD.
- g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. Serta penetapannya dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Untuk membantu kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara. Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan pengurusan gaji.

2.8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

a. Prosedur Penerimaan Kas

Dalam sistem akuntansi terdapat beberapa prosedur yang dapat digunakan guna menerapkan pengendalian intern kas. Berikut ini uraian mengenai prosedur penerimaan kas yang tercantum dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :

1. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
2. Penerimaan yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga.
 - b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga.
 - c. Disetor melalui penerimaan oleh pihak ketiga.
3. Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Prosedur penerimaan kas yang berikutnya adalah :

- a. Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- b. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.
- c. Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- d. Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggung jawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.
- e. Tata cara penyetoran dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Tabel II.1 : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....

BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS

Tanggal	Nomor		Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
	SP2D/Nota Kredit	Bukti Lain					

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

b. Prosedur Pengeluaran Kas

Berikut ini beberapa prosedur pengeluaran kas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yaitu :

1. Penyediaan Dana

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD yang disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditanda tangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Permintaan Pembayaran

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP yang dimaksud terdiri dari SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS). Pengajuan SPP dilampiri dengan daftar rincian rencana

penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

3. Perintah Membayar

Dalam hal ini dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna menerbitkan SPM dan dinyatakan tidak lengkap dan/ tidak sah, pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM. Dalam hal ini pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

4. Pencairan Dana

Dalam pencairan dana adalah kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup :

1. Register SP2D.

2. Register surat penolakan penerbitan SP2D.
3. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.

5. Pertanggungjawaban Pengguna Dana

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :

- a) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
- b) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
- c) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
- d) Register penutupan kas.

Tabel II.2 : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....

BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS

Tanggal	Nomor		Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
	SP2D/Nota Kredit	Bukti Lain					

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

6. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi,

perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain :

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method)

Merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. Dengan metode garis lurus, beban penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya sama, sehingga jumlah penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya sama, sehingga jumlah penyusutan tiap tahun dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{n \text{ (taksiran usia ekonomis aktiva)}}$$

b. Metode Saldo Menurun Ganda

Merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. Dengan metode ini penyusutan setiap tahun penggunaan aktiva tetap, ditentukan berdasarkan presentase tertentu

yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Presentase penyusutan ditetapkan sebesar dua kali presentase penyusutan menurut metode garis lurus.

Contoh : Misalnya sebuah mesin mempunyai umur ekonomis 10 tahun, harga perolehan mesin tersebut adalah Rp. 100.000.000,-. Presentase penyusutan atas mesin tersebut adalah $100\% : 10 \text{ tahun} = 10\%$

Dengan demikian besarnya persentase penyusutan menurut metode saldo menurun ganda adalah : $10\% \times 2 = 20\%$

Beban penyusutan tahun pertama adalah :

$$20\% \times 100.000.000 = 5.000.000$$

Beban penyusutan tahun kedua adalah :

$$100.000.000 - 5.000.000 = 95.000.000$$

$$95.000.000 \times 20\% = \text{Rp. } 19.000.000,- \text{ dan seterusnya.}$$

c. Metode Unit Produksi

Merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan. Dengan metode ini beban penyusutan ditetapkan atas dasar jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban penyusutan suatu periode adalah hasil kali jumlah satuan produk yang dihasilkan dengan tarif penyusutan persatuan produk. Beban penyusutan persatuan produk dihitung sebagai berikut :

Harga Perolehan – Nilai Residu

Beban penyusutan per satuan produk = $\frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Jumlah Produk yang dihasilkan selama masa penggunaan aktiva tetap}}$

7. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas SKPD meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan selain kas pada SKPD.

1. Transaksi atau kejadian selain kas, antara lain :
 - a. Pengesahan pertanggungjaawaban pengeluaran (pengesahan SPJ).
 - b. Koreksi kesalahan pencatatan.
 - c. Penerimaan donasi selain kas.
 - d. Pembelian secara kredit.
 - e. Retur pembelian kredit.
 - f. Pelepasan hak atas aktiva tetap tanpa konsekuensi kas.
 - g. Penerimaan aktiva tanpa konsekuensi kas.
2. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan berupa bukti transaksi atau kejadian mencatat kedalam bukti memorial.
3. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial mencatat kedalam buku jurnal umum.
4. Bukti transaksi mencakup antara lain :

- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ)
 - b. Berita acara pertanggungjawaban barang ; dan/atau
 - c. Surat keputusan penghapusan barang ; dan/atau
 - d. Surat pengiriman barang ; dan/atau
 - e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD) ; dan/atau
 - f. Berita acara pemusnahan barang ; dan/atau
 - g. Berita acara serah terima barang ; dan/atau
 - h. Berita acara penilaian
5. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.
6. Jika ditanggapi perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai buku besar kontrol.
7. Pencatatan kedalam Buku Jurnal Umum, Buku Besar, dan Buku Besar Pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD.

2.9. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Abdul Halim, 2002:39).

Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan

menggunakan satuan uang. Oleh karena itu, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang.

Proses berikutnya adalah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Untuk mengatur hal tersebut pemerintah juga membuat ketentuan dalam bentuk SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Ada beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debet dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan

pada buku anggaran. Oleh sebab itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah juga mencatat transaksi tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

Entry artinya setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali pencatatan. Akuntansi keuangan daerah menggunakan system pencatatan berpasangan (*double*) dinamakan menjurnal, pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi, kedua sisi harus seimbang.

b. Dasar Pengakuan

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan, yaitu masalah pengakuan. Pengakuan adalah proses memasukkan ke neraca atau laporan laba rugi (dalam konteks akuntansi keuangan daerah : laporan perhitungan anggaran), item yang memenuhi definisi elemen memenuhi kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan ada 2 yaitu : (IAI : 1999).

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos (bagian dari elemen) tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas (dalam hal ini pemerintah daerah).
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sebagai sistem/basis/dasar akuntansi. Sistem pencatatan adalah himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Abdul Halim, 2002: 39). Berbagai sistem tersebut antara lain :

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.

2. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrua Modifikasi (*Modified Accrual Basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan.

2.10. Elemen-elemen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, dokumen, atau buku pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas, transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara.

b. Jurnal

Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (urut waktu) yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

Tabel II.3 : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
BUKU JURNAL UMUM

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Ref	Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6
				Jumlah	

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

c. Buku Besar

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kesimpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat didalam jurnal. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban hutang dan ekuitas.

Tabel II.4 : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

BUKU BESAR

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Ref	Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6
				Jumlah	

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

d. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertai pada suatu periode tertentu.

Tabel II.5 : PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

DAFTAR SALDO

Nomor Rek	Nama Rek	Debet	Kredit
		Jumlah	

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

e. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya lebih dari satu periode anggaran. Penyesuaian ini mengakui pendapatan tersebut terhimpun, dan belanja/biaya dalam periode dimana barang dan jasa yang berkaitan digunakan.

Sebuah penyesuaian akan selalu melibatkan sebuah rekening pendapatan atau sebuah rekening belanja/biaya dan sebuah rekening aktiva atau rekening hutang/kewajiban. Jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan sebagai berikut :

1. Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi.
2. Melaporkan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi.
3. Melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca. Sebagai nilai aktiva pada awal telah terpakai selama satu periode akuntansi yang melaporkan.
4. Melaporkan secara akurat kewajiban (hutang) pada tanggal neraca. Dalam hal ini pembiayaan sebenarnya sudah terjadi, tetapi belum dibayar.

f. Unsur Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam akuntansi pemerintah daerah, laporan laba rugi dikenal dengan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

- 1.** Diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2.** Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas meliputi :

1) Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun

neraca awal. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan koin. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) / Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal termasuk kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, seperti deposito yang kurang dari tiga bulan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi pemerintah yang segera dapat dikonversi menjadi kas disebut dengan investasi jangka pendek. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek diakui pada saat kepemilikan terjadi yakni pada saat menerima bukti investasi. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai yang tertera pada sertifikat (bukti investasi). Penatausahaan dan pencatatan investasi jangka pendek dilakukan oleh Kementrian Keuangan.

3) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggaran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, dan Piutang Lainnya.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan (SAP, PP Nomor 71 Tahun 2010).

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar meliputi :

1) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang

meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

2) Aset tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap terdiri dari : (1) Tanah, (2) Bangunan air, (3) Instalasi, (4) Jaringan, (5) Bangunan dari gedung, (6) Mesin dan peralatan, (7) Kendaraan, (8) Meubel dan perlengkapan, (9) Buku/perpustakaan, dan (10) Aset lain-lain.

3. Aset lainnya.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi

pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan dalam dua golongan :

1) Kewajiban jangka pendek.

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Penyajian hutang pemerintah diklasifikasikan menjadi :

1. Hutang jangka pendek

Hutang jangka pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

2. Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri, hutang luar negeri, hutang luar negeri.

Hutang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul hutang untuk skedul hutang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah. Hutang dicatat sebesar nilai nominal. Pada setiap tanggal neraca, hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada neraca.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periodepelaporan.Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Untuk tujuan umum, setiap pos-pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dalam catatan atas laporan keuangan (Abdul Hafiz Tanjung, 2006 : 206).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

g. Jurnal Penutup

Rekening pendapatan dan biaya pada akhir periode akuntansi akan ditransfer kedalam rekening modal pemilik yaitu menutup rekening temporer. Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi, yang dimaksud dalam siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi.

2.11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tujuan pernyataan ini adalah untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1.Domisili dan Bentuk Hukum Serta Justifikasi Tempat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau adalah satuan kerja perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantu di daerah.Saat ini Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau beralamat di Jalan HR. Soebrantas No. 4 Pekanbaru Riau. Sesuai dengan peraturan daerah, kedudukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretariat Daerah.

1.2.Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

1. V i s i

Visi Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau beberapa tahun mendatang adalah “ Terwujudnya Propinsi Riau sebagai Pusat Kawasan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020”.

2. M i s i

Dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan Visi Dinas Tanaman Pangan Propinsi Riau di atas, maka ditetapkan misi Dinas Tanaman Pangan Propinsi Riau sebagai berikut :

- a) Menumbuhkembangkan Profesionalisme SDM Pertanian
- b) Mendorong Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berwawasan Agribisnis.
- c) Mendorong Pemberdayaan SDM Pertanian dalam upaya sistem PHT serta pengawasan pupuk dan pestida.
- d) Mendorong Pengembangan Pengolahan, Permodalan dan Pemasaran Hasil.
- e) Mendorong Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.3. Aktivitas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pertanian tanaman pangan.
- 2) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan.
- 3) Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidangnya masing-masing sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

- 4) Penetapan pembibitan/pembenihan pertanian tanaman pangan.
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian tanaman pangan teknis fungsional, keterampilan dan pendidikan pelatihan kejuruan tingkat menengah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan.
- b. Pengambilan keputusan.
- c. Perencanaan.
- d. Pengorganisasian.
- e. Pelayanan umum dan teknis.
- f. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan.
- g. Pengawasan.
- h. Pemantauan dan evaluasi.
- i. Pelaksana lapangan.
- j. Pembiayaan.
- k. Penelitian dan pengkajian.
- l. Pelaporan.

1.4. Struktur Organisasi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada saat ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan
4. Sub Dinas Pengembangan Tanaman Pangan
5. Sub Dinas Perlindungan Hortikultura
6. Sub Dinas Pengembangan Hortikultura
7. Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
8. Sub bagian
9. Seksi
10. Balai Pelatihan Tanaman Pangan (Kepala Balai dan Seksi)
11. Balai Benih Tanaman Pangan (Kepala Balai dan Seksi)
12. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas

Bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat.

2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.

c. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.

d. Sub Bagian Perlengkapan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).

e. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang tanaman pangan.

3) Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan

Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan penyidikan penyakit dibidang pertanian tanaman pangan lintas kabupaten/kota.

4) Sub Dinas Pengembangan Tanaman Pangan

Sub Dinas Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan standar pembibitan/pembenihan tanaman pangan promosi ekspor komoditas pertanian unggulan provinsi, penyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam rangka penyaluran pupuk, pestisida, benih unggulan dan sarana produksi lainnya.

5) Sub Dinas Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil

Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dan pemasaran hasil tanaman pangan.

6) Balai Pelatihan Tanaman Pangan

Balai Pelatihan Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan uji coba dan pengembangan tanaman pangan, melaksanakan pelatihan bagi petugas maupun petani dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

7) Balai Benih Tanaman Pangan

Balai Benih Tanaman pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan uji coba dan pengembangan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura di daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sistem Akuntansi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi yang dimaksud pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau yaitu berupa pendapatan dan belanja.

a. Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selama tahun anggaran. Dari alokasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk pendapatan daerah sebesar Rp. 107.447.600,00, sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 dan telah mencapai target sebesar Rp. 69.287.100,00 atau 64,48 %. Pendapatan daerah ini berasal dari retribusi daerah yang terdiri atas retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi usaha pertanian.

b. Belanja

Belanja daerah pada SKPD ini sebesar Rp. 66.947.472.394,19, sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 telah terealisasi sebesar Rp. 58.541.654.623,00. Realisasi ini meningkat dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2010 yang hanya mencapai 83,90 %.

Pengeluaran belanja pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau terdiri atas :

1. Belanja Operasi yang terdiri atas :
 - 1.1. Belanja Pegawai yakni belanja pegawai yang berhubungan langsung pada pegawai Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau berupa gaji, tunjangan, honor serta belanja pegawai tidak langsung.
 - 1.2. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa seperti belanja alat tulis kantor, belanja makan dan minuman, belanja pemeliharaan dan perlengkapan kantor, belanja BBM dan lain sebagainya.
2. Belanja Modal adalah belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin misalnya belanja modal pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (pengendalian hama/penyakit padi dalam rangka mendukung OPRM).

c. Aset

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau, yaitu berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

2. Jurnal

Sistem pencatatan yang digunakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura masih menggunakan sistem pencatatan single entry. Dimulai dari

bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup : surat perintah pencairan dana (SP2D) atau nota debet bank. Bukti transaksi sebagaimana dimaksud meliputi : surat penyediaan dana (SPD), surat perintah membayar (SPM), laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dan kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Maka PPK-SKPD melakukan pencatatan antara lain sebagai berikut :

a. Akuntansi Pendapatan (Penerimaan Kas)

Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Contoh penerimaan pajak yang di catat dalam buku kas umum sebagai berikut :

Tabel : IV.1
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau
Buku Kas Umum
Desember 2011

Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
05/12/11	Penerimaan Pajak.	Rp. 136.364	

b. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)

Berikut adalah akuntansi belanja (pengeluaran kas) yang terjadi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau :

1) Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU).

Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo UP akan digunakan SPP GU. SPP GU dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Diajukan ketika UP habis. Jika dana

yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan belanja organisasi maka Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPP-TU dan SPM-TU. Pencatatan transaksi ini terlebih dahulu dicatat dalam buku pembantu baik penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya BKU yang menggambarkan jumlah penerimaan, pengeluaran dan saldo dana oleh pada bendahara pengeluaran.

2) Akuntansi Belanja Langsung (LS)

Berdasarkan SP2D-LS untuk Gaji dan Tunjangan serta SPJ yang diterima dari bendahara pengeluaran PPK-SKPD mencatatnya dalam jurnal penerimaan kas serta jurnal pengeluaran kas.

Contoh pencatatan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 05 Desember 2011 menerima SP2D tanggal 01 Desember 2011 No. 07743/SP2D/LS/IV/2011, gaji pokok PNS / bulan November 2011. Pada BKU terlihat dilakukannya pencatatan pada sisi penerimaan sebesar Rp. 45.322.820. Dibawah ini contoh pelaksanaan BKU pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

Tabel : IV.2
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
Buku Kas Umum
Desember 2011

Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
05/12/11	SP2D tanggal 01 Desember 2011 No. 07743/SP2D/LS/IV/2011, gaji pokok PNS / bulan November	Rp. 45.322.820	

	2011.		
05/12/11	Tunjangan Keluarga	Rp. 5.042.474	
13/12/11	Basori dkk, Pembayaran Uang Saku peserta Temu Lapang Peningkatan IP100-IP200 Dalam Rangka Mendukung OPRM di Kab. Inhil.		Rp. 625.000

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

3. Laporan Keuangan

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah menyiapkan laporan keuangan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini nantinya disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran SKPD.

Laporan Keuangan yang disusun oleh PPK-Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rincian dari masing-masing laporan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari pendapatan dan belanja. Total pendapatan daerah sebesar Rp. 107.447.600,00 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 mencapai target sebesar Rp. 69.287.100,00 atau 64,48%. Sedangkan untuk total belanja yang dianggarkan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 66.947.472.394,19. Sementara realisasi belanja untuk tahun 2011 adalah Rp.58.541.654.623,00 atau mencapai 87,64% dari yang dianggarkan. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai Rp. 29.078.385.683,00 (87,58%)
- b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.028.587.140,00 (86,73%)
- c) Belanja Modal Rp. 3.434.681.800,00 (91,95%)

2. Neraca

Berdasarkan data penelitian, Neraca Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki senilai Rp. 878.287.879.043,52 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 341.500, Aset Tetap sebesar Rp. 876.748.664.559,18, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.538.872.944,34. Kewajiban sebesar 0 atau tidak memiliki kewajiban. Sedangkan Ekuitas Dana sebesar Rp. 878.287.879.043 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 341.500 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 878.287.537.543,52.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data penelitian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 menyajikan informasi sebagai berikut:

- a) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- b) Kebijakan akuntansi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- c) Penjelasan pos-pos keuangan.
- d) Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

4.2. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Pada dasarnya SKPD ini telah mengelola keuangan daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut contoh pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau :

- 1) Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum berupa penerimaan kas dicatat pada kolom penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran.

02 Des 2011: Ir. Basriman Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah (Kampar) Rp. 1.600.000

05 Des 2011 : SP2D No. 07743/SP2D/LS/IV/2011, Gaji Pokok PNS/ Bulan November 2011

05 Des 2011 : Penerimaan pajak Rp. 136.364

23 Des 2011 : Mila, Pembayaran makan dan minum rapat Rp. 800.000

30 Des 2011 : Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Rp. 1.620.000

- 2) Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura adalah meletakkannya dalam buku kas umum yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.3 : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
Buku Kas Umum
Desember 2011

Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
02/12/11	Ir. Basriman Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah (Kampar).		Rp. 1.600.000
05/12/11	SP2D No. 07743/SP2D//LS/IV/2011, Gaji Pokok PNS/ Bulan November 2011.	Rp. 45.322.820	
05/12/11	Penerimaan Pajak.	Rp. 136.364	
23/12/11	Mila, Pembayaran makan dan minum rapat.		Rp. 800.000
30/12/11	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian.		Rp. 1.620.000

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau

Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau transaksinya tidak langsung dijurnal hanya dicatat di BKU, seharusnya setiap transaksi harus langsung dijurnal agar informasinya jelas dan akurat, seperti di bawah ini :

Tabel IV.4 : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

Jurnal Umum

Des 2011

Tanggal	No. Rek	Uraian	Debet	Kredit
03/12/11		Belanja- Perjalanan Dinas Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.1.600.000	Rp. 1.600.000
05/12/11		Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Kas Daerah	Rp. 45.322.820	Rp.45.322.820
13/12/11		Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pajak	Rp.136.364	Rp. 136.364
23/12/11		Belanja- Makan Minum Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.800.000	Rp.800.000
30/12/11		Belanja- ATK Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.1.620.000	Rp.1.620.000

Sumber : Data Olahan 2011

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sudah terlihat jelas dan dinyatakan bahwa : 1) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. 2) Transaksi atau kejadian keuangan yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam buku pengeluaran kas. 3) Dan transaksi atau kejadian keuangan yang tidak mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal umum.

Namun pada pelaksanaanya pencatatan transaksi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau belum melakukan pemisahan jurnal antara penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas.

Seperti yang terlihat pada tabel IV.3, transaksi yang terjadi langsung dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum, seharusnya dilakukan pemisahan jurnal antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, seperti di bawah ini :

Tabel IV.5 : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
Buku Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	Nomor		Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
	SP2D/Nota Kredit	Bukti Lain					
01/12/11				Saldo awal			
05/12/11				Kas		136.364	136.364
05/12/11				Kas		45.322.820	45.459.184

Sumber : Data Olahan Tahun 2011

Tabel IV.6 : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
Buku Jurnal Pengeluaran Kas

Tanggal	Nomor		Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
	SP2D/Nota Kredit	Bukti Lain					
01/12/11				Saldo awal			
02/12/11				Belanja Perjalanan Dinas		1.600.000	1.600.000
23/12/11				Belanja Mkn& Minum		800.000	2.400.000
30/12/11				Belanja ATK		1.620.000	4.020.000

Sumber : Data Olahan Tahun 2011

Dari kedua tabel diatas menggambarkan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas yang seharusnya dibuat oleh PPK-SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

- Kolom 1 (tanggal) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun terlaksana.
- Kolom 2 (nomor) diisi dengan nomor dari bukti SP2D/Nota Kredit atau bukti lain terkait transaksi.

- c) Kolom 3 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek baik dari akun penerimaan maupun pengeluaran kas.
- d) Kolom 4 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, objek baik dari akun penerimaan dan pengeluaran kas.
- e) Kolom 5 (referensi) diisi dengan referensi terkait transaksi.
- f) Kolom 6 (jumlah) diisi sesuai dengan jumlah dari penerimaan ataupun pengeluaran.
- g) Kolom 7 (akumulasi) diisi dengan jumlah akumulasi transaksi penerimaan ataupun pengeluaran dari tiap tanggal transaksi.

4.3. Analisis Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penerapan yang dilakukan pada dinas ini sebenarnya sudah berjalan cukup baik misalnya dalam hal pengakuan belanja, pembiayaan dan pendapatan dengan basis kas. Salah satu kebijakan yang belum diterapkan adalah belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Dengan demikian seharusnya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau melakukan penilaian penyusutan pada : (1) peralatan dan mesin, (2) gedung dan bangunan, (3) jalan, irigasi, dan jaringan, (4) aset tetap

lainnya. Hal tersebut membuat hasil akhir pada laporan keuangan yang terlihat pada neraca tidak jelas dan akurat.

1. Pemakaian Aset Tetap

Untuk menggambarkan teknik pencatatan penyusutan dalam akuntansi pemerintahan, dengan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung nilai penyusutan atas aset tetap dapat dicontohkan sebagai berikut :

a) Penyusutan untuk Peralatan dan Mesin

Pada neraca nilai aset tetap pada peralatan dan mesin senilai Rp. 29.217.776.265,16 yang terdiri dari :

- 1) Alat-alat berat.
- 2) Alat-alat angkutan.
- 3) Alat-alat bengkel seperti dinamo, gerbok (as, bajak, roda), landasan besi 34 kg, dan sebagainya.
- 4) Alat-alat pertanian dan peternakan yang diberikan kepada kelompok tani guna menunjang kegiatan mereka seperti mesin bajak, mesin potong rumput dan tanaman, dan lain sebagainya.
- 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga seperti pengadaan mesin pompa air, komputer PC, lemari gudang brigade proteksi dan rak besi tempat penyimpanan pestisida.
- 6) Alat studio dan alat komunikasi seperti kamera digital, kamera, handycam, dan lain sebagainya.
- 7) Alat ukur disini termasuk GPS, bejana ukur, dan alat ukur lainnya.
- 8) Alat laboratorium.

9) Alat keamanan.

Jika umur ekonomis peralatan dan mesin ditaksir 5 tahun. Umur ekonomis tersebut diperoleh dari peraturan akuntansi yang berterima umum yakni PSAK 2009. Maka nilai penyusutan peralatan dan mesin yang disusutkan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Rp.29.217.776.265,16} - 0}{5 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp. 5.843.555.253.}\end{aligned}$$

Maka nilai penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.843.555.253, jurnal penyesuaian yang dapat dibuat oleh pembukuan sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp. 5.843.555.253.
Akumulasi penyusutan	Rp.5.843.555.253.

Pada pelaporan nantinya nilai akun diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp. 5.843.555.253 akan terlihat pada sisi ekuitas, sedangkan akun akumulasi penyusutan menjadi pengurang pada neraca.

b) Penyusutan untuk Gedung dan bangunan

Pada neraca nilai aset tetap pada gedung dan bangunan senilai Rp. 56.164.017.932,50. Gedung dan bangunan yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura seperti:

- 1) Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prrovinsi Riau.
- 2) Bangunan gedung saung wisata di Marpoyan-Pekanbaru.

- 3) Outlet pemasaran di Marpoyan.
- 4) Terminal Agribisnis Dumai.
- 5) Dan lain sebagainya.

Jika umur ekonomis gedung dan bangunan ditaksir 20 tahun. Umur ekonomis ini berdasarkan PSAK 2009 Paragraf 34. Maka nilai gedung dan bangunan yang disusutkan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Rp.56.164.017.932,50} - 0}{20 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp.2.808.200.897.}\end{aligned}$$

Maka nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.808.200.897, jurnal penyesuaian yang dapat dibuat oleh pembukuan sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp. 2.808.200.897.
Akumulasi penyusutan	Rp. 2.808.200.897.

Pada pelaporan nantinya nilai akun diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp. 2.808.200.897 akan terlihat pada sisi ekuitas, sedangkan akun akumulasi penyusutan menjadi pengurang pada neraca.

c) Penyusutan untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada neraca nilai aset tetap pada jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp. 7.761.809.495,14 terdiri dari

- 1) Jalan dan jembatan.
- 2) Bangunan air (irigasi).

3) Instalasi.

4) Jaringan.

Jika umur ekonomis jalan, irigasi, dan jaringan ditaksir 5 tahun. Maka nilai penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan yang disusutkan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Rp.7.991.139.251,52} - 0}{5 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp.1.598.227.850.}\end{aligned}$$

Maka nilai penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp.1.598.227.850, jurnal penyesuaian yang dapat dibuat oleh pembukuan sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp.1.598.227.850.
Akumulasi penyusutan	Rp.1.598.227.850.

Pada pelaporan nantinya nilai akun diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp. 1.598.227.850 akan terlihat pada sisi ekuitas, sedangkan akun akumulasi penyusutan menjadi pengurang pada neraca.

d) Penyusutan untuk Aset tetap lainnya

Pada neraca nilai aset tetap pada aset tetap lainnya senilai Rp. 564.920.650 terdiri dari :

- 1) Buku dan perpustakaan.
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan.
- 3) Hewan ternak dan tumbuhan.

Jika umur ekonomis aset tetap lainnya ditaksir 5 tahun. Umur ekonomis ini berdasarkan PSAK 2009. Maka nilai aset tetap lainnya yang disusutkan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Rp.564.920.650} - 0}{5 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp.112.984.130.}\end{aligned}$$

Maka nilai penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp.112.984.130, jurnal penyesuaian yang dapat dibuat oleh pembukuan sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp.112.984.130.
Akumulasi penyusutan	Rp.112.984.130.

Pada pelaporan nantinya nilai akun diinvestasikan dalam aset tetap sebesar Rp. 112.984.130 akan terlihat pada sisi ekuitas, sedangkan akun akumulasi penyusutan menjadi pengurang pada neraca.

Sehingga total penyusutan aset tetap selama tahun 2011 adalah sebesar Rp. 10.362.968.130, maka jurnal penyesuaian yang dapat dibuat bagian keuangan di akhir tahunnya adalah sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp.10.362.968.130.
Akumulasi penyusutan	Rp. 10.362.968.130.

Pada pelaporan nantinya nilai akun diinvestasikan dalam aset tetap secara keseluruhan sebesar Rp. 10.362.968.130 akan terlihat pada sisi ekuitas, sedangkan akun akumulasi penyusutan menjadi pengurang pada neraca.

2. Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 30 Desember 2011 Persediaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bersaldo Rp. 341.500,00. Mereka tidak membuat jurnal penyesuaian dari perkiraan yang memerlukan penyesuaian.

Di akhir periode atau sebelum menyusun laporan keuangan, persediaan akan disajikan dalam neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik di lapangan. Jika yang tersisa sebesar Rp. 341. 500, maka angka inilah yang akan ditampilkan dalam neraca akhir tahun. Seharusnya mereka melakukan penyesuaian seperti di bawah ini :

Tgl	No. Bukti	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
30/12	Persediaan Cadangan Persediaan		341.500	341.500

Padahal jurnal penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari perkiraan-perkiraan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan, serta untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode berikutnya. Penyesuaian dilakukan terhadap perkiraan-perkiraan tertentu karena akuntansi pemerintahan menganut basis kas untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk penyusunan Neraca.

Penyesuaian ini meliputi penyesuaian koreksi kesalahan pencatatan, pencatatan untuk transaksi yang belum dicatat, transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti piutang dan persediaan, penyesuaian akumulasi penyusutan diakhir periode akuntansi. Perkiraan-perkiraan lain yang perlu disesuaikan pada akhir tahun dan ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut :

a. Standar jurnal penyesuaian untuk pengakuan piutang pajak

Tabel IV.7: Pemerintah Kota xxx

SKPD

Jurnal Penyesuaian

Tgl	No. Bukti	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
.....	Piutang Pajak Cadangan Piutang		Xxx	Xxx

Transaksi penyesuaian ini dilakukan karena adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi seperti piutang pajak yang memerlukan penyesuaian di akhir periode akuntansi.

b. Standar jurnal penyesuaian untuk persediaan dari hasil inventarisasi fisik

Tabel IV.8 : Pemerintah Kota xxx

SKPD

Jurnal Penyesuaian

Tgl	No. Bukti	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
.....	Persediaan Cadangan Persediaan		Xxx	Xxx

Jurnal yang dibuat untuk mencatat persediaan tidak dilakukan pada saat proses produksi atau pemakaian melainkan pada akhir periode (sebelum

menyusun laporan keuangan, yakni dengan menjurnal akun persediaan di debet dan mengkredit akun Cadangan Persediaan.

c. *Standar jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap*

Tabel IV.9 : Pemerintah Kota xxx

SKPD

Jurnal penyesuaian

Tgl	No. Bukti	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Ref	Debet	Kredit
.....	Diinvestasikan dlm aset tetap Akumulasi Peny.		Xxx	Xxx

Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia jurnal penyesuaian yang dibuat untuk transaksi penyusutan seperti contoh diatas, dengan demikian jelas terlihat perbedaan jurnal penyesuaian pada akuntansi perusahaan.

d. *Jurnal penutup*

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (*temporary*) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu pendapatan dan belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan yang bersifat nominal tidak ikut atau tidak terbawa pada periode berikutnya, sehingga saldo perkiraan tersebut perlu dinihilkan. Contoh jurnal penutup adalah:

Tabel : IV.10
Pemerintah Kota xxx

SKPD

Jurnal Penutup

Tgl.	No. Bukti	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Ref.	Debet	Kredit
.....	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi SILPA	xxx xxx -	- - xxx

.....	SILPA	xxx	-
			Belanja Langsung		-	xxx
			Belanja Tidak Langsung		-	xxx

Jurnal penutup adalah mendebitkan perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debet dan selisihnya merupakan surplus atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di neraca menjadi jumlah yang benar.

4.4. Analisis Pelaporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan belanja

yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran pada PPK-SKPD Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau dalam hal pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Neraca

Neraca pada PPK-SKPD Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau yakni tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Tidak dilakukannya penilaian atas penyusutan aset tetap mengakibatkan akumulasi penyusutan bernilai 0 (nol) pada neraca, lihat pada tabel IV.11.

Tabel : IV.11
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PER 31 DESEMBER 2011

Uraian	2011	2010
<u>ASET</u>		
ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
1) Tanah	782.742.656.500,00	782.742.656.500,00
2) Peralatan dan Mesin	29.217.776.265,16	28.744.296.039,10
3) Gedung dan Bangunan	56.164.017.932,50	54.378.065.050,09
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.991.139.251,52	7.761.809.495,14
5) Aset Tetap Lainnya	564.920.650,00	564.920.650,00
6) Kontruksi Dalam Pengerjaan	68.154.000,00	68.154.000,00
7) Akumulasi Penyusutan	(10.362.968.130,00)	-
JUMLAH ASET TETAP	<u>866.385.696.469,18</u>	<u>874.259.901.734,33</u>

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah dari keseluruhan aset tetap telah memperlihatkan kondisi yang sebenarnya dan lebih akurat. Sebab sebelumnya Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau belum melakukan penghitungan terhadap penyusutan aset tetap.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal yaitu : 1) Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal, 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, 3) Kebijakan akuntansi, 4) Penjelasan pos-pos keuangan, serta 5) penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau yang telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura belum dilakukan pemisahan dalam pencatatannya. Transaksi tersebut hanya tertuang di dalam buku kas umum. Serta penggunaan sistem pencatatan yang masih menggunakan *single entry*.
2. Belum melakukan penyusutan terhadap aset tetap serta tidak membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup pada akhir periode.
3. Penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Catatan Atas Laporan Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi instansi yaitu :

1. Sebaiknya dalam pencatatan transaksi ekonomi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau memisahkan antara pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Seharusnya instansi ini menerapkan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) dalam pelaksanaannya dan prinsip basis akrual.
2. Dalam menyusun laporan keuangan sebaiknya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau menerapkan perlakuan penyusutan terhadap aset tetap yang harus dibebankan di akhir periode akuntansi serta membuat jurnal penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan.
3. Diharapkan dalam mengelola akuntansi keuangan daerah untuk tahun selanjutnya sudah efektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan peneliti tidak memperoleh daftar dari aset tetap untuk mengetahui data terkait nilai perolehan dan nilai wajar dari aset tetap tersebut, sehingga penilaian atas penyusutan masih berupa asumsi dan contoh yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintahan.

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian ini dengan memperhatikan harga perolehan maupun nilai wajar dalam melakukan penilaian aset tetap tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bahtiar, Iskandar, Muchlis, 2002, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Yogyakarta.
- Baswir Refrison, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- Belakoui, Ahmed, 2000, *Accounting Theory*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Gede Muhammad, 1999, *Akuntansi Pemerintahan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia.2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. IAI.
- James A Hall. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martina, 2009, *Analisis Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir*, *Skripsi SI* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Bagian Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.
- Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah, 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Narko, 2002, *Sistem Akuntansi*, Cetakan Ketiga, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Cetakan CV. Tamita Utama, Jakarta.

Sabeni Arifin, 1999, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah*, Edisi Keempat, BPFE Jakarta.

Syafei, Rachmat, 2008, *Fiqih Muamalah*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Syukrizal, 2008, *Analisis Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau*, *Skripsi S1* Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanjung, Abdul H, 2008, *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Ulum, Ihyaul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Umm Press, Malang.

Wulan Diana, Siska, 2009, *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar*, *Skripsi S1* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.